

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia 2010-2015 sebesar 1,43%, menurun dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 1,49%. Salah satu faktor penurunan laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah dikarenakan adanya program Keluarga Berencana (KB) (Badan Pusat Statistik, 2015).

Menurut BKKBN, KB aktif di antara Perempuan Usia Subur (PUS) tahun 2018 sebesar 63,27%, hampir sama dengan tahun sebelumnya yang sebesar 63,22%. Sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ingin dicapai tahun 2019 sebesar 66%. Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 juga menunjukkan angka yang sama pada KB aktif yaitu sebesar 63,6%. Berdasarkan pola dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi, sebagian besar peserta KB Aktif memilih suntikan dan pil sebagai alat kontrasepsi bahkan sangat dominan (lebih dari 80%) dibanding metode lainnya; suntikan (63,71%) dan pil (17,24%). Padahal suntikan dan pil termasuk dalam metode kontrasepsi jangka pendek sehingga tingkat efektifitas suntikan dan pil dalam pengendalian kehamilan lebih rendah dibandingkan jenis kontrasepsi lainnya (Profil Kesehatan Indonesia, 2018).

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menjelaskan kebutuhan ber-KB di antara wanita kawin hampir sama pada SDKI 2012 (73%) dan SDKI 2017 (74%). Wanita kawin yang kebutuhan ber-KBnya sudah

terpenuhi meningkat dalam periode yang sama, dari 62% menjadi 64%. Wanita kawin dengan kebutuhan berKB belum terpenuhi tidak mengalami perubahan yang berarti pada SDKI 2012 dan SDKI 2017 (11%) dimana 4% untuk menjarangkan kelahiran dan 7% untuk membatasi kelahiran.

Program KB adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan, untuk mencapai hal tersebut dibuatlah beberapa cara untuk mencegah ataupun menunda kehamilan, walaupun dalam pelaksanaannya pelayanan KB yang berkualitas belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam memilih alat kontrasepsi seperti kurangnya sarana yang dibutuhkan, pendidikan, sosial ekonomi, budaya, agama, status wanita, dukungan suami, dan kemandirian wanita. Hal ini dikarenakan setiap metode atau alat kontrasepsi yang dipilih memiliki efektifitas yang berbeda-beda.

Pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga merupakan salah satu hal yang mendukung terhadap pelaksanaan program pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Menurut SDKI (2017) kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) pada wanita yang tidak berpartisipasi dalam keputusan rumah tangga hampir sama dibandingkan dengan wanita yang berpartisipasi dalam semua keputusan, yaitu 12% dan 11%.

Pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi yang bukan atas kehendak sendiri serta informasi yang terbatas memunculkan adanya ketidakcocokan dengan alat kontrasepsi yang digunakan, kekhawatiran

terhadap bahaya kesehatan. Secara umum, 34% wanita yang mulai memakai alat/cara KB dalam 5 tahun sebelum survei berhenti memakai alat/cara itu dalam waktu 12 bulan setelah mulai memakai (SDKI, 2018).

Tingkat putus pakai paling tinggi adalah pil (46%), disusul oleh suntik KB (28%) dan kondom (27%). Tingkat putus pakai MKJP jauh lebih rendah, seperti IUD (9%) dan susuk KB (6%) (SDKI, 2018).

Peneliti mengharapkan pemberian *discharge planning* menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) bisa mengurangi tingkat putus pakai kontrasepsi pada wanita. Pemberian informasi mengenai kontrasepsi diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan ibu sehingga dapat mengurangi tingkat putus pakai dan mampu membuat ibu memutuskan kontrasepsi yang akan dipakai berdasarkan kebutuhan ibu masing-masing.

Pemahaman yang berbeda dari individu terkait antara suami dengan istri tentang keluarga berencana memunculkan keputusan yang berbeda pula. Tidak menutup kemungkinan bahwa pemaksaan terhadap pengambilan keputusan terjadi antar individu. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang karakteristik dari masing-masing individu tersebut. Oleh sebab itu dalam pengambilan keputusan penggunaan alat kontrasepsi perlu diketahui faktor yang berpengaruh. Pengambilan keputusan yang tepat akan membawa pada keberlanjutan program keluarga berencana.

Discharge Planning atau perencanaan pulang merupakan suatu proses yang dinamis dan sistematis dari penilaian, persiapan, serta koordinasi yang dilakukan untuk memberikan kemudahan pengawasan pelayanan kesehatan

juga pelayanan sosial sebelum dan sesudah pulang. Perencanaan pulang merupakan proses yang dinamis, agar tim kesehatan mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyiapkan klien melakukan perawatan mandiri dirumah. Perencanaan pulang didapatkan dari proses interaksi dimana perawat professional, klien, dan keluarga berkolaborasi untuk memberikan dan mengaur kontinuitas keperawatan yang diperlukan.

Penelitian Setiadi, Lilik Iswanto (2015) menunjukkan banyak istri tidak mengetahui jenis kontrasepsi yang terbaik buat dirinya dan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode kontrasepsi. Faktor istri yang bekerja di luar rumah mempunyai pengaruh dalam meningkatnya determinasi sang istri dalam pembuatan keputusan. Dalam kelompok umur di atas 24 tahun, istri juga memiliki peran yang cukup kuat. Demikian juga, determinasi pengambilan keputusan masalah-masalah dalam keluarga baik oleh istri atau bersama-sama dengan berkontribusi besar akan meningkatkan kemampuan istri untuk mengambil keputusan dalam pemakaian kontrasepsi

Penelitian Talat Khadivzadeh, Robab Latifnejad Roudsari, dan Masoud Bahrami (2014) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan, kerja dan pemberdayaan perempuan dalam beberapa dekade terakhir, dan perubahan peran gender menyebabkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan kesuburan dan kecenderungan mereka untuk memiliki keluarga yang lebih kecil. Lebih lanjut, kecenderungan perempuan yang meningkat terhadap peran laki-laki dalam masyarakat tidak disertai dengan perubahan peran atau partisipasi laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga; oleh

karena itu, perempuan menghadapi peningkatan beban kerja dan tanggung jawab baik di rumah maupun di tempat kerja. Karena perempuan yang bekerja lebih terlibat dalam kegiatan sosial (tanpa dukungan yang cukup di tempat kerja), jumlah anak yang diinginkan berkurang di antara perempuan ini.

Hasil studi pendahuluan didapatkan bahwa 3 dari 5 ibu mengikuti keputusan suami dalam menentukan KB apa yang akan digunakan, mereka juga bertanya kepada tetangga mengenai KB apa yang digunakan dan apa efek samping setelah memakai KB tersebut. Jenis KB yang ingin digunakan oleh 5 ibu tersebut adalah suntik KB 3 bulanan dan mengakui bahwa masih takut jika akan menggunakan KB IUD atau implan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Gambaran *Discharge Planning* Pada Ibu Nifas Menggunakan ABPK Dengan Kemandirian Ibu Dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi di PMB “M” Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Discharge Planning* menggunakan ABPK sebagai salah satu langkah untuk menilai kemandirian ibu dalam memilih alat kontrasepsi yang akan digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran *discharge planning* pada ibu nifas menggunakan ABPK dengan kemandirian ibu dalam pemilihan alat kontrasepsi di PMB “M” Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Umum

Mendeskripsikan gambaran *discharge planning* pada ibu nifas menggunakan ABPK dengan kemandirian ibu dalam pemilihan alat kontrasepsi di PMB “M” Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

1.3.2 Khusus

- a. Mendiskripsikan *discharge planning* pada ibu nifas menggunakan ABPK
- b. Mendiskripsikan *discharge planning* pada ibu nifas tidak menggunakan ABPK
- c. Mendiskripsikan kemandirian ibu nifas dalam memilih alat kontrasepsi.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tenaga kesehatan mengenai kemandirian ibu nifas dalam memilih alat kontrasepsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari pemberian informasi yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemandirian ibu dalam memilih alat kontrasepsi yang akan digunakan.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam kegiatan proses belajar dan kajian pustaka mengenai gambaran *discharge planning* pada ibu nifas menggunakan ABPK dengan kemandirian ibu dalam pemilihan alat kontrasepsi.

c. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan cara meningkatkan kemandirian ibu ber-KB mengenai gambaran *discharge planning* pada ibu nifas menggunakan ABPK dengan kemandirian ibu dalam pemilihan alat kontrasepsi.